

Strategi Resolusi Konflik Sipil-Militer Dalam Era Disinformasi: Klaim Ilegal Pasukan Garuda Hitam PMPP TNI

Nur Afiyin Tadore A¹, Rachmat Setiawibawa², Arifuddin Uksan³, M. Adnan Madjid⁴,
Kusuma⁵

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

E-mail: afiyintadore@gmail.com¹, rachmatwibawa90@gmail.com², arifuddinuksan123@gmail.com³,
adnanmadjid62@gmail.com⁴, kusumaunhan@gmail.com⁵

Article History:

Received: 15 November 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 11 Januari 2026

Keywords: *Disinformasi digital, Hubungan sipil-militer, Resolusi konflik, Digital Peacebuilding, Komunikasi krisis, Ketahanan informasi, Cognitive warfare, PMPP TNI.*

Abstract: *Era digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hubungan sipil-militer, di mana disinformasi menjadi salah satu bentuk ancaman non-tradisional terhadap stabilitas nasional. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik sipil-militer di era disinformasi dengan studi kasus “Pasukan Garuda Hitam” yang mencatut nama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana narasi palsu terbentuk, menyebar, serta memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital dapat menimbulkan konflik perseptual, mengikis kepercayaan publik, dan menciptakan ketegangan sipil-militer. Melalui integrasi teori hubungan sipil-militer (Huntington), kekerasan struktural (Galtung), transformasi konflik (Lederach), komunikasi krisis (Coombs), dan ketahanan informasi nasional, penelitian ini menemukan bahwa strategi resolusi yang efektif perlu berbasis kolaborasi multi-aktor, literasi digital, serta komunikasi strategis pertahanan. Selain itu, teori information warfare (Bennett, 2020), cognitive security, dan strategic communication (NATO StratCom, 2022) memperkuat pemahaman bahwa disinformasi merupakan instrumen geopolitik yang dapat dimitigasi melalui diplomasi militer dan pendekatan digital peacebuilding. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model resolusi konflik adaptif berbasis ketahanan informasi nasional.*

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah lanskap komunikasi global secara fundamental. Informasi kini menjadi senjata strategis, bukan hanya alat komunikasi. Dalam konteks pertahanan nasional, arus informasi yang tidak terkendali dapat menciptakan instabilitas politik, krisis kepercayaan, bahkan konflik sosial yang bersumber dari persepsi yang salah. Salah satu

fenomena nyata di Indonesia adalah munculnya disinformasi mengenai “Pasukan Garuda Hitam”, yang mencatut nama PMPP TNI dan menyebar luas melalui media sosial antara 2023–2024. Disinformasi ini menampilkan narasi heroik tentang pasukan TNI yang gugur di Gaza, lengkap dengan foto, simbol, dan video palsu. Dalam waktu singkat, narasi tersebut viral dan menimbulkan reaksi emosional publik. Meskipun TNI segera melakukan klarifikasi resmi, dampak disinformasi telah menciptakan kebingungan dan keraguan terhadap kredibilitas informasi militer. Kasus ini menggambarkan bahwa ancaman terhadap pertahanan tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga kognitif. Dalam konteks hubungan sipil–militer, kepercayaan publik merupakan fondasi utama. Ketika publik mempersepsi militer sebagai sumber informasi yang tidak transparan, potensi konflik meningkat. Seperti disebut Huntington (1957), kontrol sipil yang objektif hanya dapat berjalan jika profesionalisme militer diimbangi dengan legitimasi publik. Namun, di era digital, legitimasi tidak lagi ditentukan oleh fakta, melainkan oleh persepsi yang dibentuk algoritma media sosial. Penelitian ini penting karena memperluas diskursus hubungan sipil–militer ke dalam ranah digital, yang belum banyak dikaji di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teori klasik dan kontemporer tentang disinformasi, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi resolusi konflik adaptif berbasis transformasi sosial dan ketahanan informasi nasional.

LANDASAN TEORI

A. Teori Hubungan Sipil–Militer

Konsep hubungan sipil–militer merupakan salah satu fondasi penting dalam kajian pertahanan dan keamanan nasional. Samuel P. Huntington melalui karya klasiknya *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations* (1957) mengemukakan bahwa stabilitas politik suatu negara sangat ditentukan oleh keseimbangan antara profesionalisme militer dan kontrol sipil yang objektif. Dalam pandangannya, militer adalah entitas profesional dengan fungsi inti mempertahankan negara dari ancaman eksternal, sedangkan otoritas sipil berperan mengontrol arah strategis dan kebijakan politik pertahanan. Ketika keseimbangan tersebut terganggu baik karena intervensi politik yang berlebihan terhadap militer maupun karena militer mengambil alih peran politik sipil maka lahir potensi konflik struktural yang dapat mengancam tatanan nasional. Huntington membedakan dua jenis kontrol sipil terhadap militer, yaitu *subjective civilian control* dan *objective civilian control*. Kontrol subjektif terjadi ketika institusi politik berupaya menundukkan militer melalui kooptasi ideologis, penempatan pejabat sipil dalam struktur militer, atau pembatasan otonomi profesionalnya. Sebaliknya, kontrol objektif bersifat rasional dan profesional, di mana militer diberi kebebasan dalam urusan teknis pertahanan, tetapi tetap tunduk pada otoritas politik sipil yang sah. Model kontrol objektif ini dianggap paling ideal untuk menjamin stabilitas hubungan sipil–militer di negara demokratis. Disinformasi terhadap lembaga militer, seperti kasus “Pasukan Garuda Hitam”, secara tidak langsung mengganggu keseimbangan antara persepsi publik (sipil) dan profesionalisme militer. Dalam kerangka Huntington, fenomena ini bisa dikategorikan sebagai bentuk *cognitive distortion of civilian control*, yaitu ketika kontrol sipil dilemahkan bukan oleh kekuasaan militer, tetapi oleh manipulasi persepsi masyarakat terhadap militer. Ketika publik kehilangan kepercayaan akibat paparan informasi palsu, legitimasi sipil terhadap militer ikut tergerus. Akibatnya, hubungan sipil–militer yang seharusnya sinergis berubah menjadi relasi yang penuh kecurigaan. Dalam kerangka resolusi konflik, teori Huntington dapat digunakan untuk menganalisis disinformasi sebagai ancaman terhadap keseimbangan struktural hubungan sipil–militer. Ketika narasi publik terhadap TNI dipengaruhi oleh informasi palsu, maka diperlukan mekanisme resolusi yang tidak

hanya menekankan aspek klarifikasi fakta, tetapi juga pemulihan kepercayaan institusional. Huntington mungkin tidak membahas langsung aspek komunikasi digital, tetapi prinsip *objective civilian control* dapat diterjemahkan ulang dalam konteks era informasi: bahwa militer harus tetap profesional, adaptif terhadap perubahan media, namun tidak terjebak dalam arena politik opini publik. PMPP TNI sebagai lembaga pelatihan dan representasi diplomasi militer Indonesia menghadapi tantangan ini secara nyata. Sebagai bagian dari *soft power* pertahanan Indonesia, citra PMPP di mata dunia bergantung pada kredibilitas informasinya. Ketika muncul narasi palsu yang mengaitkan lembaga ini dengan operasi militer fiktif di luar negeri, terjadi apa yang disebut sebagai *symbolic reputational attack* yaitu serangan simbolik terhadap reputasi lembaga pertahanan. Menurut kerangka Huntington, respons terhadap serangan semacam ini harus didasarkan pada dua langkah: pertama, mempertahankan profesionalisme internal melalui sistem komunikasi yang disiplin; kedua, memperkuat relasi kepercayaan dengan publik sipil melalui transparansi dan edukasi. Sejalan dengan pemikiran Huntington, beberapa ahli hubungan sipil–militer kontemporer seperti Bruneau dan Matei (2018) menegaskan bahwa tantangan baru bagi militer modern bukan hanya pada aspek hierarki dan disiplin, tetapi juga pada kemampuan berinteraksi secara efektif dengan masyarakat dalam ekosistem informasi terbuka. Profesionalisme militer abad ke-21 menuntut adaptasi terhadap *networked public sphere* (Benkler, 2013), di mana kecepatan informasi sering kali melampaui kemampuan birokrasi militer untuk merespons. Di sinilah relevansi teori Huntington diuji dan diperluas, profesionalisme bukan lagi sekadar kemampuan teknis dan etis, melainkan juga kapasitas komunikasi strategis yang mampu menjaga legitimasi di era digital. Selain itu, Huntington juga menekankan konsep “military mind” suatu etos yang berorientasi pada disiplin, objektivitas, dan pengabdian kepada negara. Ketika narasi disinformasi menyerang aspek moral dan kehormatan militer, respons yang tidak tepat justru dapat memperburuk konflik. Misalnya, reaksi defensif berlebihan atau kecenderungan menutup diri dari publik bisa menimbulkan persepsi bahwa militer tidak transparan. Sebaliknya, pendekatan berbasis profesionalisme menuntut keterbukaan informasi sejauh tidak mengancam keamanan nasional. Dalam kerangka resolusi konflik, teori Huntington menawarkan jalan tengah antara kontrol sipil yang kuat dan otonomi militer yang profesional. Jika diterapkan pada kasus “Pasukan Garuda Hitam”, maka strategi resolusi yang efektif harus memperkuat koordinasi antara lembaga sipil seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lembaga akademik seperti Unhan, dan institusi militer seperti PMPP TNI. Kolaborasi ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kebijakan komunikasi publik dan strategi pertahanan informasi. Selain itu, teori Huntington dapat dikontekstualisasikan dengan teori komunikasi krisis (Coombs, 2015) untuk menghasilkan pendekatan integratif dalam menangani disinformasi. Di satu sisi, militer harus mempertahankan disiplin komunikasi dan netralitas politik; di sisi lain, militer juga harus menjadi bagian dari ekosistem komunikasi publik yang terbuka dan terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme militer di era digital tidak lagi cukup diukur dari kemampuan tempur, melainkan juga dari kemampuan mengelola informasi secara etis dan efektif. Secara keseluruhan, teori Huntington tetap relevan dalam memahami hubungan sipil–militer Indonesia di era disinformasi. Meskipun konteksnya telah berubah dari perang konvensional ke perang informasi, prinsip dasarnya tetap sama: stabilitas nasional hanya dapat dijaga melalui sinergi antara kontrol sipil yang objektif dan profesionalisme militer yang adaptif. Dalam kerangka resolusi konflik, keseimbangan inilah yang menjadi basis utama pembangunan kepercayaan dan ketahanan nasional berbasis informasi.

B. Teori Kekerasan Struktural dan Kultural (Galtung, 1996)

Teori kekerasan struktural dan kultural yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1996) merupakan

salah satu kerangka analitis paling berpengaruh dalam studi perdamaian dan resolusi konflik. Galtung memperluas konsep kekerasan dari yang semula dipahami semata sebagai tindakan fisik menjadi bentuk kekerasan yang lebih halus dan tidak kasat mata, yakni kekerasan yang tertanam dalam struktur sosial, budaya, maupun sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Ia berargumen bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk senjata atau agresi militer, tetapi bisa termanifestasi melalui sistem sosial yang menyebabkan penderitaan, ketidakadilan, atau penghambatan terhadap potensi manusia. Dalam pemikiran Galtung, terdapat tiga dimensi kekerasan yang saling berhubungan: kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*). Kekerasan langsung mencakup bentuk-bentuk agresi yang tampak, seperti perang, penindasan, atau penganiayaan. Kekerasan struktural merujuk pada sistem sosial atau kebijakan yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan misalnya kemiskinan sistemik, diskriminasi, atau pembatasan akses informasi. Sedangkan kekerasan kultural adalah legitimasi simbolik terhadap kekerasan struktural melalui nilai, ideologi, dan narasi yang diterima oleh masyarakat. Jika tiga bentuk kekerasan ini digambarkan dalam bentuk segitiga Galtung (*Conflict Triangle*), maka kekerasan langsung berada di puncak dan menjadi manifestasi dari kekerasan struktural dan kultural yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, kekerasan yang terlihat hanyalah gejala dari sistem sosial yang lebih dalam dan kompleks. Teori kekerasan struktural dan kultural Galtung memberikan lensa yang sangat relevan untuk memahami dampak disinformasi terhadap hubungan sipil–militer di Indonesia. Disinformasi bukan hanya ancaman terhadap reputasi militer, tetapi juga terhadap struktur sosial dan budaya yang menopang legitimasi negara. Kekerasan yang lahir dari disinformasi bersifat halus, menyusup dalam sistem nilai dan struktur media, sehingga membutuhkan strategi resolusi yang multidimensi. Dalam kasus “Pasukan Garuda Hitam”, teori Galtung membantu kita memahami bahwa tantangan terbesar bukanlah membantah kebohongan, tetapi membongkar sistem sosial yang memungkinkan kebohongan itu dipercaya. Oleh karena itu, resolusi konflik di era disinformasi harus berorientasi pada transformasi struktural dan kultural: membangun sistem informasi yang adil, budaya digital yang etis, dan relasi sipil–militer yang berbasis kepercayaan.

C. Teori Transformasi Konflik (Lederach, 1997)

Teori Transformasi Konflik yang diperkenalkan oleh John Paul Lederach (1997) menjadi salah satu tonggak penting dalam kajian resolusi konflik modern, terutama dalam konteks sosial yang kompleks, berlapis, dan melibatkan aktor beragam seperti negara, masyarakat sipil, dan lembaga militer. Berbeda dari paradigma klasik resolusi konflik yang berorientasi pada penghentian kekerasan (*conflict resolution*) atau negosiasi kompromi (*conflict management*), Lederach mengusulkan pendekatan yang lebih mendalam: *conflict transformation* yaitu perubahan mendasar dalam relasi, struktur, dan persepsi yang menjadi akar penyebab konflik. Pendekatan ini lahir dari refleksi Lederach terhadap pengalaman lapangan di kawasan yang dilanda perang sipil seperti Amerika Tengah dan Afrika. Ia berargumen bahwa konflik bukan sekadar anomali sosial yang harus dihapus, melainkan gejala dari struktur hubungan yang tidak adil dan sistem sosial yang tidak adaptif terhadap perbedaan. Maka, tujuan utama transformasi konflik bukan hanya mengakhiri pertikaian, melainkan membangun hubungan baru yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Dalam pandangan Lederach, setiap konflik memiliki tiga dimensi utama: hubungan (*relationship*), struktur (*structure*), dan kultur (*culture*). Ketiganya saling berinteraksi membentuk dinamika konflik. Transformasi konflik terjadi ketika ketiga dimensi ini diubah melalui dialog, rekonsiliasi, dan restrukturisasi sistem sosial. Dengan kata lain, resolusi konflik sejati tidak hanya berhenti pada “perdamaian negatif” (ketiadaan kekerasan), tetapi mencapai

“perdamaian positif” (kehadiran keadilan sosial dan rekonsiliasi hubungan). Teori Transformasi Konflik dari John Paul Lederach memberikan landasan moral dan konseptual bagi strategi resolusi konflik sipil–militer di era disinformasi. Pendekatan ini menggeser paradigma dari penyelesaian jangka pendek menuju pembangunan sistem sosial yang tangguh, komunikatif, dan inklusif. Dalam konteks kasus “Pasukan Garuda Hitam”, transformasi konflik berarti membangun kepercayaan baru antara masyarakat dan militer melalui rekonsiliasi informasi, restrukturisasi komunikasi publik, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di ruang digital. Dengan demikian, Lederach mengajarkan bahwa resolusi konflik sejati bukanlah menghapus perbedaan, tetapi mengubahnya menjadi kekuatan bersama untuk membangun kedamaian yang berkelanjutan. Di tengah derasnya arus disinformasi global, Indonesia membutuhkan bukan hanya pertahanan fisik, tetapi juga *pertahanan relasional* yakni kemampuan untuk menjaga kohesi sosial dan solidaritas nasional melalui komunikasi yang damai, empatik, dan transformatif.

D. Teori Komunikasi Krisis (Coombs, 2015)

Teori Komunikasi Krisis yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs menjadi salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam bidang komunikasi organisasi modern, terutama dalam konteks penanganan isu publik, reputasi, dan legitimasi institusi. Teori ini berangkat dari premis bahwa krisis bukan hanya peristiwa yang mengancam keberlangsungan organisasi, tetapi juga *ujian moral* terhadap kepercayaan publik. Dalam perspektif Coombs (2015), krisis didefinisikan sebagai “*the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously impact an organization's performance and generate negative outcomes*”. Krisis, dengan demikian, bukan hanya bersifat objektif, melainkan juga perseptual. Artinya, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai krisis jika publik mempersepsikannya demikian, terlepas dari fakta internal organisasi. Pandangan ini menjadikan teori Coombs sangat relevan dalam menganalisis fenomena disinformasi digital, di mana persepsi publik sering kali dibentuk oleh narasi yang tidak sesuai dengan realitas faktual. Dalam konteks hubungan sipil–militer, teori ini memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana lembaga pertahanan seperti PMPP TNI harus mengelola komunikasi publik ketika menghadapi serangan reputasi berbasis informasi palsu, sebagaimana dalam kasus “Pasukan Garuda Hitam”. Teori Komunikasi Krisis dari Coombs memberikan panduan strategis bagi lembaga militer untuk menghadapi ancaman reputasi di era digital. Krisis bukan semata peristiwa, melainkan ujian persepsi dan legitimasi. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola krisis bergantung pada kemampuan organisasi untuk merespons dengan cepat, empatik, dan konsisten. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini dapat memperkuat hubungan sipil–militer melalui komunikasi yang transparan dan partisipatif. PMPP TNI dapat menjadi model militer modern yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga tangguh secara komunikasi publik. Dengan demikian, disinformasi bukan lagi ancaman yang menakutkan, melainkan peluang untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme lembaga pertahanan di mata rakyat dan dunia.

E. Teori Soft Power (Nye, 2004)

Konsep Soft Power yang diperkenalkan oleh Joseph S. Nye Jr. (2004) menandai perubahan paradigma besar dalam cara negara memandang kekuasaan di era globalisasi. Nye berargumen bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan kekuatan militer atau ekonomi (*hard power*), melainkan juga dengan kemampuan menarik simpati dan memengaruhi perilaku aktor lain melalui nilai, budaya, dan legitimasi moral. Dalam tulisannya *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Nye menyebut soft power sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payment*”. Soft power menjadi semakin relevan dalam konteks abad ke-21, di mana batas antara perang dan perdamaian semakin kabur, dan medan pertempuran

bergeser dari ranah fisik menuju ranah kognitif dan informasi. Kemenangan dalam perang modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling kuat, tetapi oleh siapa yang mampu membentuk narasi dan persepsi publik global. Dalam konteks Indonesia, terutama bagi lembaga seperti Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, soft power menjadi instrumen strategis untuk membangun citra Indonesia sebagai negara damai dan kredibel dalam misi internasional. Teori Soft Power Joseph Nye memberikan kerangka penting untuk memahami peran militer Indonesia dalam konteks global dan domestik. Di era disinformasi, kekuatan lunak menjadi benteng pertama pertahanan moral bangsa. Soft power memungkinkan Indonesia memengaruhi dunia tanpa paksaan, melalui keteladanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan reputasi profesional. Dalam konteks kasus “Pasukan Garuda Hitam”, soft power menjadi kunci dalam memulihkan citra TNI di mata publik. Dengan menggabungkan diplomasi militer, komunikasi strategis, dan literasi digital, Indonesia dapat memperkuat daya tarik moralnya sekaligus melawan manipulasi informasi yang merusak. Maka, di tengah perang informasi global, kemenangan sejati bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara fisik, tetapi oleh siapa yang paling dipercaya.

F. Teori Information Warfare dan Cognitive Security

Perkembangan teknologi informasi global telah menciptakan medan konflik baru yang tak kalah berbahayanya dengan perang konvensional, yakni information warfare atau perang informasi. Dalam paradigma ini, kekuatan tidak lagi diukur dari seberapa besar senjata yang dimiliki suatu negara, tetapi dari kemampuan mengendalikan informasi, membentuk opini publik, dan memengaruhi pola pikir lawan. Sejalan dengan pandangan klasik Clausewitz bahwa “perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain,” maka di abad ke-21, perang informasi dapat dipahami sebagai kelanjutan politik melalui cara digital dan kognitif. Konsep information warfare dipopulerkan oleh para analis keamanan siber pada awal 1990-an, namun dikembangkan secara sistematis oleh Bennett (2020), Rid (2020), dan lembaga-lembaga seperti NATO Strategic Communications Centre of Excellence (StratCom). Menurut Bennett, *“Information warfare is the deliberate use and manipulation of information to influence perception, behavior, and decision-making processes of targeted audiences.”* Dalam konteks ini, informasi menjadi senjata strategis, sedangkan pikiran manusia menjadi medan perangnya. Teori Information Warfare dan Cognitive Security memperluas pemahaman tentang keamanan nasional dari sekadar pertahanan fisik menuju pertahanan kognitif. Dalam dunia yang didominasi informasi, kemenangan bukan lagi milik pihak yang memiliki kekuatan destruktif terbesar, tetapi milik pihak yang mampu menjaga kebenaran, kepercayaan, dan integritas informasi. Kasus “Pasukan Garuda Hitam” menunjukkan bahwa perang kognitif dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan tanpa satu pun peluru ditembakkan. Oleh karena itu, penguatan keamanan kognitif menjadi keharusan strategis bagi Indonesia. Melalui kombinasi literasi digital, komunikasi strategis, dan kolaborasi sipil–militer, TNI dapat membangun ketahanan nasional berbasis kesadaran dan integritas.

Dengan kata lain, pertahanan abad ke-21 adalah pertahanan pikiran. Dan dalam konteks itu, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada pasukannya, tetapi pada masyarakat yang berpikir kritis, berjiwa damai, dan setia pada kebenaran.

G. Teori Strategic Communication in Defense

Teori komunikasi strategis pertahanan (strategic communication in defense) berkembang seiring dengan perubahan paradigma keamanan global dari era perang fisik menuju era informasi. Dalam pandangan NATO Strategic Communications Centre of Excellence (StratCom, 2022), komunikasi strategis bukan hanya fungsi pelengkap kebijakan pertahanan, tetapi merupakan komponen inti dari strategi keamanan nasional. Komunikasi menjadi senjata non-kinetik yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu misi, baik dalam konteks perang

konvensional maupun dalam menghadapi ancaman asimetris seperti disinformasi dan propaganda digital. NATO mendefinisikan komunikasi strategis sebagai *“the coordinated and appropriate use of NATO communications activities and capabilities – Public Diplomacy, Public Affairs, Military Public Affairs, Information Operations and Psychological Operations – in support of Alliance policies, operations and activities.”* (NATO StratCom, 2022). Dalam kerangka ini, komunikasi strategis bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi juga proses membangun, melindungi, dan mempertahankan legitimasi strategis. Dengan kata lain, komunikasi strategis berfungsi sebagai jembatan antara kekuatan keras (hard power) dan kekuatan lunak (soft power). Teori Komunikasi Strategis Pertahanan menegaskan bahwa pertahanan modern tidak hanya dibangun di medan perang, tetapi juga di ruang narasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, siapa yang menguasai narasi, dialah yang mengendalikan legitimasi. Bagi Indonesia, penguatan komunikasi strategis berarti memperkuat kedaulatan informasi dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. PMPP TNI sebagai simbol profesionalisme dan diplomasi militer Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tindakan, setiap pesan, dan setiap simbol yang dibawa pasukan Garuda mencerminkan nilai luhur bangsa: damai, terhormat, dan berdaulat. Dengan demikian, komunikasi strategis pertahanan bukan sekadar alat menyampaikan pesan, tetapi adalah senjata moral bangsa yang menjaga agar kebenaran, kepercayaan, dan kehormatan nasional tetap utuh di tengah badai disinformasi global.

H. Digital Peacebuilding (Lederach & Appleby, 2021)

Konsep digital peacebuilding merupakan hasil evolusi dari teori *peacebuilding* klasik yang dikembangkan oleh John Paul Lederach (1997, 2015) dan diperluas oleh R. Scott Appleby (2021) dalam konteks globalisasi informasi. Jika peacebuilding tradisional berfokus pada rekonsiliasi sosial pascakonflik melalui dialog, keadilan restoratif, dan pembangunan sosial, maka digital peacebuilding mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut ke ranah dunia maya (cyberspace) ruang yang kini menjadi medan konflik baru akibat disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Menurut Lederach dan Appleby (2021), *“digital peacebuilding seeks to transform online spaces from arenas of hostility into environments for empathy, dialogue, and collective resilience.”* Dengan demikian, digital peacebuilding tidak hanya menargetkan aktor-aktor negara, tetapi juga masyarakat digital (netizens) sebagai subjek aktif dalam menciptakan perdamaian. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat relevan karena dunia digital telah menjadi ruang utama komunikasi publik, termasuk dalam isu-isu pertahanan dan keamanan. Kasus disinformasi “Pasukan Garuda Hitam” menjadi contoh konkret bagaimana konflik informasi dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan institusi pertahanan. Melalui pendekatan digital peacebuilding, ruang digital tidak lagi dilihat sebagai sumber ancaman, tetapi sebagai medium rekonsiliasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebenaran dan perdamaian informasi. Teori Digital Peacebuilding oleh Lederach dan Appleby memperluas paradigma perdamaian dari ranah sosial-politik ke ranah digital. Dalam konteks pertahanan Indonesia, konsep ini menawarkan pendekatan baru untuk menangani disinformasi dan konflik kognitif melalui partisipasi masyarakat. Digital peacebuilding bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi gerakan moral untuk memulihkan ruang digital sebagai tempat dialog, empati, dan kebersamaan. Bagi PMPP TNI, pendekatan ini berarti melibatkan rakyat dalam menjaga citra dan misi perdamaian Indonesia bukan dengan sensor, tetapi dengan kolaborasi dan edukasi. Dengan demikian, di era perang informasi, perdamaian tidak hanya dibangun di meja perundingan, tetapi juga di ruang digital. Ketika setiap warga menjadi penjaga kebenaran dan empati, maka Indonesia tidak hanya tangguh dalam pertahanan fisik, tetapi juga unggul dalam pertahanan moral dan kognitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif–analitis, yang bertujuan memahami secara mendalam makna sosial dan implikasi strategis fenomena disinformasi terhadap hubungan sipil–militer Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu disinformasi, legitimasi militer, dan keamanan kognitif tidak dapat dijelaskan melalui angka atau variabel kuantitatif semata, melainkan melalui pemahaman interpretatif terhadap narasi, konteks sosial, dan dinamika komunikasi publik. Jenis penelitian ini adalah studi kasus(case study research), dengan fokus pada kasus disinformasi “Pasukan Garuda Hitam” (2024) yang menyerang citra lembaga PMPP TNI(Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian). Kasus ini dianggap representatif karena memperlihatkan kompleksitas ancaman informasi yang melibatkan aktor digital,persepsi publik dan respons institusional. Pendekatan ini bersifat multi-teoretis dengan mengintegrasikan teori hubungan sipil–militer(Huntington),teori kekerasan struktural(Galtung),teori komunikasi krisis(Coombs),teori soft power (Nye),teori komunikasi strategis pertahanan (NATO StratCom)dan teori digital peacebuilding (Lederach & Appleby). Penelitian ini berfokus pada PMPP TNI Sentul, Bogor, sebagai lembaga pusat pelatihan dan diplomasi perdamaian militer Indonesia yang terkena dampak disinformasi. Analisis juga mencakup ruang digital Indonesia sebagai locus utama konflik informasi, dengan pengamatan terhadap dinamika media sosial (Twitter/X, Instagram, dan Facebook) selama periode Oktober–Desember 2024. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama yaitu Dampak disinformasi terhadap citra dan legitimasi lembaga militer di mata public, Strategi komunikasi pertahanan yang digunakan dalam menangani krisis reputasi dan Potensi kolaborasi sipil–militer digital dalam membangun ketahanan informasi nasional. Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, meliputi:

- a. Pejabat Humas PMPP TNI,
- b. Perwakilan Kementerian Pertahanan,
- c. Akademisi Universitas Pertahanan RI,
- d. Jurnalis pertahanan nasional, dan
- e. Aktivis literasi digital.

Selanjutnya, observasi langsung terhadap aktivitas komunikasi publik PMPP TNI (situs web, konferensi pers, dan akun resmi media sosial). Analisis narasi publik melalui komentar dan percakapan daring terkait isu “Pasukan Garuda Hitam.” Kemudian melalui data sekunder seperti dokumen resmi (press release TNI, laporan Kemhan, dan publikasi PBB). Ada juga artikel akademik dan laporan kebijakan tentang disinformasi dan keamanan kognitif. Dan literatur teoretis dari Huntington, Galtung, Coombs, Nye, StratCom, dan Lederach.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem pertahanan negara modern, ancaman terhadap kedaulatan tidak lagi bersifat konvensional atau bersenjata, melainkan semakin sering datang dalam bentuk ancaman non-militer berbasis informasi. Fenomena disinformasi “Pasukan Garuda Hitam” yang viral pada tahun 2024 menggambarkan dengan jelas betapa kekuatan informasi dapat mengguncang persepsi publik terhadap lembaga pertahanan nasional. Narasi palsu tentang pasukan TNI yang disebut melakukan operasi militer di Gaza tanpa mandat resmi telah menciptakan kebingungan dan bahkan memunculkan kecurigaan publik terhadap institusi pertahanan. Padahal, TNI melalui PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) hanya melaksanakan misi di bawah bendera PBB sesuai mandat internasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik persepsi dapat menggantikan konflik bersenjata sebagai bentuk baru dari konflik kognitif (cognitive conflict).

Dampaknya bukan hanya pada reputasi lembaga, tetapi juga pada legitimasi sipil–militer yang menjadi fondasi stabilitas nasional. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana teori hubungan sipil–militer, teori kekerasan struktural, teori komunikasi krisis, teori soft power, teori keamanan kognitif, serta teori digital peacebuilding saling melengkapi dalam memahami dan menanggulangi ancaman disinformasi terhadap militer demokratis di Indonesia.

A. Analisis Teoretis: Interkoneksi Lima Perspektif Akademik

a. Perspektif Huntington: Disinformasi dan Profesionalisme Militer

Dari sudut pandang Samuel P. Huntington (1957), disinformasi seperti “Pasukan Garuda Hitam” dapat dilihat sebagai bentuk gangguan terhadap *objective civilian control*. Dalam situasi ideal, kontrol sipil yang objektif berarti sipil memegang otoritas politik, sementara militer diberi otonomi profesional dalam ranah pertahanan. Namun, disinformasi mengganggu keseimbangan tersebut dengan menciptakan *distorsi persepsi publik* publik sipil menilai militer bukan berdasarkan kinerja, melainkan berdasarkan narasi palsu. Akibatnya, kepercayaan terhadap militer menurun, kontrol sipil melemah, dan hubungan sipil–militer menjadi rentan terhadap politisasi informasi. Ini berpotensi mendorong militer ke posisi defensif dalam opini publik, padahal mereka adalah korban manipulasi informasi. Huntington menyebut kondisi ini sebagai *crisis of legitimacy*, ketika profesionalisme militer diuji oleh krisis kepercayaan masyarakat sipil. Dalam konteks PMPP TNI, disinformasi tersebut menuntut respons berbasis profesionalisme: bukan dengan retaliasi verbal, tetapi dengan komunikasi transparan, disiplin, dan berbasis fakta. Reaksi emosional justru dapat memperkuat kesan negatif. Profesionalisme yang stabil, rasional, dan terbuka menjadi alat utama memulihkan kepercayaan publik.

b. Perspektif Galtung: Kekerasan Struktural dan Kekerasan Informasional

Melalui lensa Johan Galtung (1996), disinformasi dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural terjadi ketika struktur sosial termasuk ekosistem informasi menciptakan ketidakadilan dan penderitaan tanpa pelaku langsung. Disinformasi menimbulkan kerusakan sosial secara sistemik: menghambat akses masyarakat terhadap kebenaran, menciptakan kebencian antarwarga, dan menormalisasi ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Sedangkan kekerasan kultural muncul ketika narasi palsu mengakar dalam budaya digital, membentuk persepsi kolektif bahwa “segala sesuatu bisa dipercaya selama viral.” Dalam konteks ini, masyarakat menjadi korban sekaligus pelaku. Penyebaran hoaks dan disinformasi menciptakan rantai kekerasan simbolik yang merusak *trust* fondasi sosial perdamaian. Dengan demikian, resolusi konflik dalam kasus disinformasi bukan hanya klarifikasi fakta, tetapi transformasi struktur komunikasi publik. Pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat perlu menciptakan *peaceful information structure* lingkungan informasi yang adil, transparan, dan beretika.

c. Perspektif Coombs: Krisis Reputasi dan Strategi Komunikasi Pertahanan

Menurut W. Timothy Coombs (2015), krisis reputasi yang dialami PMPP TNI merupakan krisis tipe *victim cluster*, di mana organisasi menjadi korban dari peristiwa eksternal yang menimbulkan persepsi negatif. Model Situational Crisis Communication Theory (SCCT) mengajarkan bahwa strategi komunikasi yang paling efektif dalam situasi ini adalah *denial* (penolakan berbasis data) dan *bolstering* (penguatan reputasi dengan menunjukkan kontribusi positif lembaga). PMPP TNI telah melakukan langkah *informational response* melalui klarifikasi resmi, namun berdasarkan teori Coombs, langkah ini perlu ditingkatkan menjadi *relational response* yakni menjalin komunikasi dua arah dengan publik untuk membangun kembali kepercayaan. Strategi komunikasi pertahanan yang tepat mencakup: *Rapid response* (respon cepat terhadap isu viral), *Consistent narrative* (pesan tunggal dan konsisten antarunit TNI), *Empathetic framing*

(menunjukkan pemahaman terhadap kebingungan publik), dan *Long-term reputation repair* (narasi positif berkelanjutan tentang kontribusi perdamaian Indonesia). Dengan demikian, teori Coombs memperkuat kebutuhan bahwa komunikasi pertahanan bukan sekadar klarifikasi, melainkan diplomasi reputasi.

d. Perspektif Nye: Soft Power dan Daya Tarik Moral Militer

Joseph Nye (2004) menegaskan bahwa kekuatan lunak (*soft power*) suatu negara bersumber dari kemampuannya memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai dan moral, bukan melalui paksaan. Dalam konteks ini, TNI khususnya PMPP merupakan instrumen utama *soft power* Indonesia di dunia internasional. Namun, disinformasi dapat merusak fondasi *soft power* tersebut dengan cara menurunkan *credibility capital* kepercayaan global terhadap reputasi moral Indonesia. Kasus “Pasukan Garuda Hitam” secara potensial mengancam citra Indonesia sebagai kontributor perdamaian dunia, karena memunculkan persepsi salah bahwa Indonesia melakukan intervensi militer unilateral. Oleh karena itu, strategi pertahanan tidak cukup berorientasi pada *hard power*, tetapi harus memasukkan komunikasi strategis berbasis *soft power* yakni memperlihatkan nilai-nilai profesionalisme, kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi identitas TNI. Nye menegaskan: “*In an information age, credibility is the most valuable currency of power.*” Maka, menjaga kredibilitas publik TNI berarti menjaga kekuatan lunak bangsa Indonesia itu sendiri.

e. Perspektif StratCom: Pertahanan Informasi dan Keamanan Kognitif

Teori Strategic Communication (StratCom) dari NATO (2022) memandang komunikasi sebagai komponen integral pertahanan nasional. Dalam era informasi, narasi adalah bagian dari domain perang strategis. Kemenangan dicapai bukan hanya melalui senjata, tetapi juga melalui dominasi makna dan persepsi publik. Dalam konteks Indonesia, komunikasi strategis pertahanan menjadi mekanisme operasional dalam menghadapi perang informasi. PMPP TNI, sebagai lembaga diplomasi militer global, perlu mengembangkan doktrin komunikasi pertahanan yang memadukan diplomasi publik, operasi informasi, dan psikologi strategis. Hal ini sejalan dengan doktrin pertahanan semesta Indonesia, di mana rakyat menjadi bagian integral dari sistem pertahanan. Dengan memperkuat komunikasi strategis, pemerintah dan TNI dapat memastikan bahwa setiap warga menjadi aktor pertahanan kognitif, bukan sekadar konsumen informasi.

f. Perspektif Lederach & Appleby: Digital Peacebuilding dan Rekonsiliasi Sosial

Teori Digital Peacebuilding (Lederach & Appleby, 2021) menawarkan pendekatan humanistik untuk mengatasi konflik berbasis informasi. Dalam kasus disinformasi militer, perdamaian digital berarti membangun kembali kepercayaan sosial melalui kolaborasi sipil–militer dalam melawan narasi palsu. Digital peacebuilding berupaya mengubah ruang digital dari arena polarisasi menjadi ruang dialog. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi korban atau penyebar hoaks, tetapi menjadi agen perdamaian digital yang aktif menjaga narasi kebangsaan dan kebenaran. Bagi PMPP TNI, strategi ini dapat diterjemahkan melalui pelibatan publik dalam literasi digital, kampanye *#FaktaUntukGaruda*, dan diplomasi sosial berbasis empati. Pendekatan ini bukan hanya teknis, tetapi moral sebuah *moral imagination in digital age* yang mengembalikan nilai kemanusiaan dalam komunikasi pertahanan.

B. Analisis Kasus: Disinformasi “Pasukan Garuda Hitam”

a. Kronologi dan Mekanisme Penyebaran

Kasus ini bermula dari unggahan akun anonim yang mengklaim adanya “pasukan rahasia Indonesia” yang gugur di Palestina pada akhir 2024. Unggahan tersebut memanfaatkan visual militer Indonesia dan narasi patriotik-religius untuk menimbulkan simpati publik. Dalam waktu kurang dari 48 jam, informasi ini tersebar di lebih dari 50 grup media sosial dan aplikasi pesan

tertutup. Hasil penelusuran menunjukkan pola khas *information warfare cycle* (Bennett, 2020):

- *Targeting* yaitu publik nasionalis dan religius.
- *Narrative Engineering* adalah kisah heroik dan religius yang menggugah emosi.
- *Amplification* dengan penyebaran cepat melalui influencer dan akun bayangan.
- *Normalization* yaitu narasi dianggap kebenaran sosial dan dibela oleh banyak warganet.

Proses ini menunjukkan bahwa disinformasi bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang sistematis untuk menguji ketahanan sosial dan kredibilitas lembaga pertahanan.

b. Dampak Sosial dan Kognitif

Dampak utama dari disinformasi ini meliputi:

- Krisis Kepercayaan: sebagian masyarakat mulai meragukan transparansi TNI.
- Fragmentasi Sosial: perdebatan emosional di ruang digital menyebabkan polarisasi dan pertentangan antarwarga.
- Delegitimasi Institusional: narasi negatif melemahkan posisi diplomatik Indonesia di forum internasional.

Dari perspektif *cognitive security*, situasi ini menggambarkan lemahnya ketahanan kognitif publik terhadap manipulasi informasi. Masyarakat cenderung percaya pada narasi emosional ketimbang fakta rasional.

c. Respons PMPP TNI

PMPP TNI segera mengeluarkan klarifikasi resmi melalui rilis pers, media sosial, dan konferensi media. Namun, sebagaimana dijelaskan Coombs (2015), respons semacam ini hanya bersifat *informational*. Agar efektif, perlu dilanjutkan dengan strategi *relational* yakni membangun komunikasi dua arah dengan publik. Beberapa langkah yang dapat dikategorikan sebagai praktik komunikasi strategis pertahanan:

- Menyediakan penjelasan visual dan faktual (infografik dan video klarifikasi).
- Melibatkan akademisi dan media nasional untuk menyebarkan penjelasan berbasis bukti.
- Membangun narasi alternatif: “Garuda Untuk Perdamaian Dunia” sebagai simbol *soft power* Indonesia.

Langkah-langkah ini menunjukkan peningkatan profesionalisme komunikasi publik militer, namun masih memerlukan integrasi sistemik ke dalam doktrin komunikasi strategis nasional.

C. Model Resolusi Konflik Sipil–Militer di Era Digital

Berdasarkan integrasi enam teori utama, penelitian ini mengajukan Model Resolusi Konflik Sipil–Militer Digital (*Digital Civil–Military Conflict Resolution Model*) yang mencakup empat tahap utama:

- Deteksi dan Klarifikasi Cepat (berbasis Coombs & StratCom) Sistem intelijen informasi mendeteksi narasi palsu sedini mungkin dan melakukan klarifikasi dengan data valid.
- Rekonstruksi Narasi Kebangsaan (berbasis Galtung & Nye) Mengganti narasi konflik dengan narasi damai dan keadilan, menonjolkan nilai kemanusiaan dan profesionalisme TNI.
- Kolaborasi Sipil–Militer Digital (berbasis Huntington & Lederach) Mendorong masyarakat menjadi mitra TNI dalam menjaga kebenaran dan solidaritas digital.
- Transformasi Kultural Informasi Pendidikan literasi digital dan etika komunikasi publik menjadi bagian dari bela negara modern.

Model ini menempatkan pertahanan informasi bukan sebagai tanggung jawab militer semata, melainkan sebagai gerakan nasional berbasis kolaborasi.

D. Rekomendasi Strategis

Penguatan Doktrin Pertahanan Informasi Nasional Integrasi konsep *information warfare*,

cognitive security, dan *digital peacebuilding* ke dalam Rencana Strategis Kemenhan dan TNI.

- Pembentukan Pusat Komunikasi Strategis Pertahanan Nasional (PKSPN) Sebagai wadah koordinasi lintas lembaga dalam menangani isu disinformasi nasional.
- Pelibatan Akademisi dan Media Independen Untuk memastikan setiap klarifikasi lembaga pertahanan memiliki kredibilitas sosial.
- Kampanye Nasional Literasi Pertahanan Digital Program edukasi publik bahwa melawan hoaks adalah bagian dari bela negara.
- Peningkatan Kapasitas Komunikasi PMPP TNI
- Meningkatkan kemampuan personel dalam diplomasi publik, komunikasi krisis, dan pengelolaan informasi global.

Analisis ini menunjukkan bahwa disinformasi adalah bentuk baru konflik sipil–militer berbasis persepsi. Ia tidak menyerang struktur fisik negara, tetapi menyerang struktur makna dan kepercayaan. Melalui pendekatan teoretis lintas disiplin Huntington, Galtung, Coombs, Nye, StratCom, dan Lederach dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik bukan pada sensor atau pembatasan, melainkan pada kolaborasi, transparansi, dan pendidikan informasi. PMPP TNI dapat menjadi pelopor paradigma baru pertahanan nasional: “From Armed Peacekeeping to Digital Peacebuilding.” Perdamaian tidak lagi hanya dijaga oleh pasukan di lapangan, tetapi juga oleh warganet yang berpikir kritis, berempati, dan setia pada kebenaran.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari fenomena disinformasi “Pasukan Garuda Hitam”, yang memperlihatkan transformasi konflik modern dari ranah militer menuju ranah informasi dan persepsi publik. Dalam konteks pertahanan nasional Indonesia, disinformasi tidak hanya menjadi ancaman komunikasi, tetapi juga ancaman strategis terhadap legitimasi hubungan sipil–militer dan stabilitas sosial nasional. Dari hasil analisis multidimensional yang mengintegrasikan teori Hubungan Sipil–Militer (Huntington, 1957), Kekerasan Struktural dan Kultural (Galtung, 1996), Komunikasi Krisis (Coombs, 2015), Soft Power (Nye, 2004), Komunikasi Strategis Pertahanan (NATO StratCom, 2022), dan Digital Peacebuilding (Lederach & Appleby, 2021), dapat disimpulkan beberapa hal penting. Disinformasi adalah bentuk konflik kognitif dan kekerasan simbolik yang menyerang legitimasi institusi pertahanan melalui manipulasi informasi. Ia bukan sekadar isu komunikasi, tetapi ancaman sistemik terhadap keamanan nasional berbasis kepercayaan. Hubungan sipil–militer di era digital menuntut profesionalisme dan transparansi.

- Kontrol sipil yang objektif (Huntington) hanya dapat berjalan bila publik memiliki kepercayaan terhadap integritas dan keterbukaan lembaga pertahanan.
- Kekerasan informasi (Galtung) mengubah struktur sosial menjadi rentan terhadap kebencian dan polarisasi. Karena itu, resolusi konflik harus menyasar akar struktural: ketidakadilan informasi dan rendahnya literasi digital masyarakat.
- Krisis reputasi militer (Coombs) dapat ditangani melalui komunikasi strategis yang cepat, empatik, dan terkoordinasi. PMPP TNI perlu memadukan klarifikasi faktual dengan pendekatan emosional yang membangun kedekatan sosial.
- Soft Power (Nye) menjadi senjata utama dalam pertahanan modern. Kekuatan moral dan reputasi TNI di dunia internasional adalah aset diplomasi yang harus dijaga melalui komunikasi yang kredibel dan konsisten.

- Komunikasi Strategis Pertahanan (NATO StratCom) harus dijadikan doktrin nasional. Kemenangan dalam perang informasi ditentukan oleh kemampuan negara mengendalikan narasi, bukan hanya senjata.

- Digital Peacebuilding (Lederach & Appleby) menjadi jalan rekonsiliasi sosial di era disinformasi. Pendekatan ini mengubah masyarakat dari objek informasi menjadi subjek perdamaian digital yang aktif menjaga kebenaran.

Dengan mengintegrasikan seluruh teori tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pertahanan nasional abad ke-21 harus berbasis kolaborasi, komunikasi, dan kebenaran. Pertahanan informasi adalah pertahanan moral bangsa dan kepercayaan publik adalah benteng utama kedaulatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi teoretis, beberapa saran strategis dapat diajukan untuk penguatan kebijakan pertahanan dan tata kelola informasi nasional. Bagi Pemerintah dan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI):

- Merumuskan Doktrin Pertahanan Informasi Nasional yang mengintegrasikan aspek cyber defense, komunikasi strategis, dan keamanan kognitif.
- Membentuk Pusat Komunikasi Strategis Pertahanan (PKSP) sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian untuk menghadapi disinformasi dan perang kognitif.
- Mendorong diplomasi pertahanan berbasis *soft power* dengan menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan profesionalisme TNI.

Bagi Tentara Nasional Indonesia (khususnya PMPP TNI):

- Meningkatkan kapasitas personel dalam bidang komunikasi publik, diplomasi digital, dan krisis reputasi.
- Membangun sistem pemantauan disinformasi internasional dan mekanisme tanggap cepat berbasis *data verification*.
- Menjalankan kampanye digital berkelanjutan seperti *#GarudaUntukPerdamaian* untuk memperkuat citra TNI sebagai kekuatan lunak Indonesia di dunia.

Bagi Akademisi dan Universitas Pertahanan RI:

- Mengembangkan riset kolaboratif tentang pertahanan informasi dan peacebuilding digital yang menggabungkan ilmu militer, komunikasi, dan teknologi informasi.
- Menjadikan literasi digital dan keamanan kognitif sebagai bagian dari kurikulum bela negara modern.

Bagi Masyarakat dan Media:

- Mendorong partisipasi aktif warga dalam digital peacebuilding, dengan membangun jejaring *cyber peace community* yang melawan hoaks dan ujaran kebencian.
- Mengedepankan etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial dalam meliput isu pertahanan agar tidak memperkuat narasi manipulatif.

C. Penutup Reflektif

Pertahanan nasional kini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, melainkan oleh ketahanan makna dan kepercayaan. Dalam dunia yang didominasi informasi, bangsa yang mampu menjaga kebenaran adalah bangsa yang sejati kuat. Disinformasi “Pasukan Garuda Hitam” hanyalah satu contoh bagaimana narasi dapat menjadi senjata. Namun, kasus ini juga membuka kesadaran baru: bahwa perdamaian dan kedaulatan di era digital hanya dapat dijaga melalui sinergi rakyat dan tentara, berbasis empati, integritas, dan pengetahuan. Sebagaimana pesan Bung Karno bahwa “perang modern adalah perang otak dan perang hati,” maka di abad ke-21, pertahanan Indonesia harus berpijak pada dua hal yang tak tergoyahkan: pikiran yang kritis dan hati yang jujur. Dengan

fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya akan tangguh dalam menghadapi disinformasi, tetapi juga menjadi pelopor diplomasi perdamaian digital (digital peace diplomacy) di dunia. Keterbatasan penelitian: fokus hanya pada satu kasus di Indonesia; penelitian lanjutan perlu membandingkan kasus serupa di negara lain untuk memperkaya generalisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Appleby, R. S. (2021). *Faith and the digital peacebuilding agenda*. Notre Dame, IN: Kroc Institute for International Peace Studies.
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). *Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372–378.
- Bennett, C. (2020). *Information warfare and the new frontiers of strategic influence*. London: Routledge.
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Oslo: PRIO.
- Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lederach, J. P., & Appleby, R. S. (2021). *Digital peacebuilding and moral imagination in the information age*. Oxford: Oxford University Press.
- NATO StratCom. (2022). *Strategic communications handbook for defense practitioners*. Riga: NATO StratCom Centre of Excellence.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York, NY: Public Affairs.
- Rid, T., & Hecker, M. (2021). *Understanding information warfare*. London: IISS.
- Wardle, C. (2023). *Information disorder revisited*. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.